

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, karena Berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. UMKM merupakan bagian dari sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, tetapi juga memperluas basis ekonomi. Dengan demikian, pengembangan UMKM dapat berkontribusi lebih cepat dalam perubahan struktural, meningkatkan perekonomian, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Suryani, 2023)

UMKM tidak hanya membantu mengurangi perbedaan pendapatan dan kemiskinan, tetapi juga memperluas ekonomi. Dengan cara melalui penyediaan lapangan kerja, yang dimana menjadi solusi atas tingginya tingkat pengangguran dengan menciptakan banyak peluang kerja di berbagai sektor. Lalu memberikan sumbangan yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, meskipun secara Individu mungkin memiliki skala yang lebih kecil, namun secara kolektif mereka memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM juga seringkali menjadi wadah bagi inovasi dan kreativitas terutama di sektor industri kreatif, Dengan skala usaha yang lebih kecil, UMKM lebih fleksibel

dalam Menghasilkan produk atau layanan inovatif yang sesuai dengan permintaan pasar lokal (Fatmayanti et al., 2023).

Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan dalam mengembangkan bisnis mereka. Seperti UMKM yang dikelola oleh individu atau keluarga dengan keterampilan manajemen dan bisnis terbatas yang dapat menghambat perkembangan usaha. Keterbatasan dalam akses ke pasar yang lebih luas menjadi hambatan bagi UMKM untuk tumbuh, mereka mungkin memiliki produk yang baik tetapi sulit untuk menjangkau konsumen di luar wilayah lokal. Dan kendala yang tak kalah penting adalah akses terhadap pembiayaan. Kurangnya akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya jaminan, kurangnya pengetahuan tentang prosedur perbankan, dan tingginya suku bunga pinjaman (Azizah et al., 2022).

Pemerintah bersama lembaga keuangan telah berusaha untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM guna mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi. Salah satu inisiatif pemerintah yang dianggap efektif dalam membantu permodalan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan perubahan atas peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara resmi diperkenalkan pada 5 November 2007. Pembiayaan yang diberikan melalui KUR berasal dari dana yang dikelola oleh bank atau lembaga keuangan yang berperan sebagai penyalur KUR. (Putra, 2022).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menawarkan pinjaman dalam bentuk uang tunai kepada para peminjam, dengan tujuan menyediakan modal untuk memulai usaha baru sesuai dengan prinsip KUR. Fokus utama dari Kredit Usaha Rakyat adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi usaha kecil dengan memberikan pembiayaan kepada usaha rintisan yang berskala kecil. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, (<https://data.go.id/dataset/dataset/total-penyaluran-kur>), sejak awal tahun hingga 14 Desember 2023, total nilai akad penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp248,1 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 5,99 juta orang.

Program KUR diluncurkan pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan akses pembiayaan bagi UMKM. KUR menawarkan skema pembiayaan yang lebih terjangkau dan mudah diakses dibandingkan dengan sumber pembiayaan konvensional lainnya. Namun, efektivitas KUR dalam mendorong pengembangan UMKM masih perlu dievaluasi secara komprehensif. Salah satu faktor kunci keberhasilan KUR adalah kemampuan UMKM dalam memanfaatkan dana tersebut secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan yang baik, perencanaan bisnis yang matang, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar menjadi penentu utama dalam memaksimalkan manfaat KUR. Selain manajemen usaha, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, akses pasar, dan

regulasi pemerintah juga berpengaruh terhadap dampak KUR terhadap UMKM. Kondisi ekonomi yang stabil dan kebijakan pemerintah yang mendukung akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang juga aktif dalam menyalurkan KUR kepada UMKM. Bank Syariah Indonesia (BSI) terbentuk dari penggabungan tiga bank syariah milik pemerintah, yaitu PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Merger ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan daya saing bank syariah di Indonesia. Dengan adanya BSI, diharapkan Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan (Putri et al., 2023).

Pembiayaan KUR di BSI KC Lhokseumawe Merdeka 3 adalah penyalur KUR berdasarkan prinsip syariah, penyaluran dilakukan melalui BSI KC Lhokseumawe Merdeka 3. Melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah, BSI KC Lhokseumawe Merdeka 3 berupaya memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Lhokseumawe. Program ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, tetapi juga memiliki peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja baru serta memberdayakan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penyediaan akses pembiayaan yang mudah dan sesuai dengan prinsip syariah, terutama bagi UMKM yang memiliki potensi produktivitas yang tinggi.

Tabel 1. 1
Presentase nasabah KUR di BSI KC Lhokseumawe
Merdeka 3 per-produk tahun 2023

Produk BSI KUR	Presentase
Super Mikro	5%
KUR Mikro	55%
KUR Kecil	40%

Sumber : wawancara bersama Furqan 08 Desember 2024

Tabel 1.1 menunjukkan distribusi nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Lhokseumawe Merdeka 3 pada tahun 2023. Dari total 1.171 nasabah UMKM yang menerima pembiayaan KUR, mayoritas (55%) memilih produk KUR Mikro, diikuti oleh KUR Kecil (40%) dan Super Mikro (5%). Tingginya peminat KUR Mikro disebabkan oleh kebutuhan modal yang lebih besar bagi usaha mikro yang sedang berkembang, banyak usaha mikro yang berkembang pesat, maka permintaan KUR Mikro akan meningkat. Sementara itu, popularitas KUR Kecil yang cukup tinggi (40%) karena syarat dan ketentuan yang lebih mudah dipenuhi atau jangka waktu pengembalian yang lebih fleksibel dibandingkan dengan KUR Mikro. Proporsi yang kecil pada Super Mikro (5%) menunjukkan bahwa segmen usaha yang sangat kecil ini memiliki akses pembiayaan yang lebih terbatas atau kebutuhan modal yang relatif lebih rendah. Data ini menunjukkan bahwa BSI Cabang Lhokseumawe Merdeka 3 memiliki data yang lengkap dan akurat terkait penyaluran KUR dan perkembangan UMKM nasabahnya.

BSI Kantor Cabang Lhokseumawe Merdeka 3 menawarkan beragam produk pembiayaan kepada nasabahnya, yang disesuaikan dengan skala usaha dan kebutuhan modal. Mekanisme pembiayaan ini mengacu pada prinsip syariah, khususnya akad musyarakah dan murabahah, yang memberikan fleksibilitas dan

transparansi bagi kedua belah pihak. Produk pembiayaan tersebut terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pembiayaan super mikro, KUR mikro, hingga KUR kecil, yang membedakannya berdasarkan plafon pinjaman dan tingkat profit marjin. Pembiayaan mikro, dengan plafon dan profit marjin yang relatif lebih rendah, dirancang khusus untuk UMKM yang memiliki skala usaha yang lebih kecil, sehingga lebih mudah diakses dan sesuai dengan kemampuan mereka. BSI KC Lhokseumawe Merdeka 3 memiliki nasabah UMKM dengan berbagai jenis usaha dan skala usaha yang beragam. Sasaran utama penyaluran pembiayaan mikro adalah UMKM di Kota Lhokseumawe, guna memberdayakan usaha mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Jumlah UMKM di Kota Lhokseumawe sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah kota. Jenis usahanya pun beragam, mulai dari kuliner, usaha jahit, hingga industri rumah tangga. Namun, yang paling banyak adalah usaha di bidang kuliner, terutama warung kopi dan kedai-kedai yang banyak ditemukan di area ramai di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMK Kota Lhokseumawe, saat ini terdapat 6.848 unit UMKM di Kota Lhokseumawe. Dari total tersebut, 6.438 unit tergolong dalam kategori mikro, 439 unit dalam kategori kecil, dan 60 unit dalam kategori menengah. UMKM ini tersebar di berbagai sektor strategis, termasuk perdagangan, pertanian, industri, perikanan, transportasi, dan peternakan. (<https://www.lhokseumawekota.go.id/berita-XWgp>)

Banyaknya UMKM di Kota Lhokseumawe membuat perbankan syariah memiliki tugas untuk meningkatkan atau mengembangkan UMKM melalui penyaluran dana. Bank syariah bertujuan untuk menyalurkan kesejahteraan kepada

nasabahnya. Namun, masih ada beberapa kendala yang ditemukan, baik dari pihak bank maupun dalam distribusi dana oleh nasabah. Masih ada nasabah yang tidak bisa mengelola pembiayaan tersebut dengan baik untuk mengembangkan usaha UMKM mereka. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha sering kali tidak dikelola dengan benar, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Banyak usaha UMKM menghadapi masalah, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang keuangan, sehingga dana yang ada tidak digunakan dengan baik untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu, yang sangat diperlukan adalah edukasi keuangan bagi UMKM di Kota Lhokseumawe, dan peran ini bisa diambil oleh Bank Syariah Indonesia sebagai penyalur pembiayaan. Bank sering kali hanya fokus menyalurkan pembiayaan tanpa memberikan bimbingan kepada nasabah tentang cara mengelola dana tersebut. Padahal, hubungan antara bank dan nasabah sebenarnya adalah kemitraan, di mana bank seharusnya tidak hanya memberikan dana, tetapi juga membantu nasabah UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan oleh BSI dianggap efektif jika dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan usaha nasabah yang menerima pembiayaan tersebut, khususnya dalam sektor KUR.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana dana KUR dimanfaatkan oleh UMKM, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan dana tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menyelidiki kendala yang dihadapi UMKM dalam mengelola pembiayaan KUR. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam mengevaluasi efektivitas program KUR, memberikan rekomendasi untuk peningkatan program, dan

memberikan wawasan bagi UMKM dalam mengoptimalkan pemanfaatan pemberian untuk pengembangan usaha mereka, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Lhokseumawe. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan UMKM itu sendiri dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penjelasan yang telah ada maka rumusan masalah yang menjadi penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada nasabah BSI KC Lhokseumawe Merdeka 3.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kalangan nasabah BSI KC Lhokseumawe Merdeka 3.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, dengan mengkaji secara empiris pengaruh program KUR terhadap pengembangan UMKM. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur dan teori yang ada terkait dengan pemberian UMKM dalam konteks ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Bank

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi PT BSI KC Lhokseumawe Merdeka 3 untuk meningkatkan efektivitas program KUR dalam mendukung pengembangan UMKM. Informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh program KUR dapat digunakan untuk merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran dalam menyalurkan program KUR kepada UMKM.

b. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi UMKM dalam memanfaatkan program KUR untuk pengembangan usaha. Dan juga memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM.